



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN, PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan;



- c. bahwa berdasarkan Lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah kedua kalinya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENGAWASAN PENGELOLAAN, DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup di Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada di Daerah.
5. Kepala BLH adalah Kepala BLH Daerah.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup BLH Daerah.
7. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
10. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 skala Kabupaten yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 skala Kabupaten dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara yang sumbernya berada dalam wilayah administrasi Daerah sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.



12. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
13. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
14. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
15. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
16. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
17. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
18. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
19. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya sejenis yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ada di Daerah.
22. Pengawas adalah Pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan/atau PPLHD yang bertugas di SKPD dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.



23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan/atau PPLHD untuk mengetahui tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
24. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3;
 - b. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala BLH terkait penerbitan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Daerah.



- (3) BLH melaksanakan kewenangan Bupati dalam memproses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan melampirkan sertifikat dan/atau bukti kalibrasi alat dari lembaga yang berkompeten; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3 dengan melampirkan sertifikat dari lembaga yang berkompeten.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
- b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.



Pasal 7

Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan Lampiran II dan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis sebagaimana huruf a dan huruf b dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. Penetapan keputusan atas permohonan izin oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.



- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Penetapan atas terpenuhinya atau tidaknya persyaratan administrasi permohonan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Penetapan atas terpenuhinya atau tidaknya persyaratan teknis permohonan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan persetujuan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Tembusan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Menteri, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregional Jawa dan Gubernur.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;



6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 kepada Bupati melalui BLH.
- f. sistem pengawasan; dan
- g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Keputusan penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Bupati atau surat Kepala BLH dengan disertai alasan penolakan; dan
- c. Tembusan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b. diberikan kepada Menteri, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregional Jawa dan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, lokasi, cara penyimpanan, dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
- telah habis masa berlaku izin; atau
 - dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, dan pemegang izin tidak melakukan hal sesuai peringatan yang diberikan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim yang dibentuk oleh Kepala BLH.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPLHD dan/atau Pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau



- b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BLH.

BAB III

PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Bupati melalui Dinas/Instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Bupati **melalui** Kepala BLH.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPLHD dan/atau Pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.



Pasal 19

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan **Surat Perintah Tugas** dari Kepala BLH.

Pasal 20

PPLHD dan/atau Pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki area penghasil, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan area lingkungan yang tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh/sampel limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan hal lain yang secara teknis dianggap perlu;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan dan pengambilan gambar audio visual; dan
- e. memeriksa dan membuat ***status penataan*** badan usaha terhadap perizinan pengelolaan dan/atau pengumpulan limbah B3.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemohon izin.



Pasal 23

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik .

BAB V
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1532



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 52 Tahun 2013

TANGGAL : 24 Desember 2013

FORMULIR PERMOHONAN

IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :

Kepada Yth:

Lampiran :

Bapak Bupati Gresik

Perihal :

di-

tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Jabatan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp / Fax :	Telp. (.....)/..... Fax. (.....)/.....
4.	Alamat e-mail :
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp / Fax :	Telp. (.....)/..... Fax. (.....)/.....
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor / Tanggal Akte Pendirian *** :
6.	NPWP :
		Jenis izin
		No. Persetujuan / izin
7.	Izin – izin yang :	1. AMDAL / UKL/UPL / SPPL



diperoleh	2. IMB 3. Izin Prinsip / Izin Lokasi 4. SIUP 5. Izin Gangguan (HO) 6.
-----------	--	----------------------------------

C. Lampiran permohonan izin

No.	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas, letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah / pemanfaat / penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****	√	√	

Catatan:

- Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
- PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
- * = Tergantung skala izin yang diajukan
- ** = Sesuai pengajuan izin
- *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan



f. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan
stempel perusahaan,

(.....)

JDIH KAB GRESIK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR :



	out dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan penyusunan/ penataan)	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah B3 – Diangkut oleh siapa – Menggunakan kendaraan apa – Tujuan akhir digunakan untuk apa	
	i. Surat kerjasama dengan pihak pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 (disertai manifest)	
	j. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin Prinsip / Izin Lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin Gangguan (HO) e. Persetujuan AMDAL / UKL- UPL / SPPL	
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi bangunan tempat penyimpanan limbah B3 berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Sudah termasuk dalam Izin Mendirikan Bangunan dan/atau sesuai peraturan yang berlaku;



4. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter;
3. Lokasi bebas dari banjir;
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter;
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk;
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api



- ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber Panas
- j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan bahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.



Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned} 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\ &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\ &= 0,23 \text{ m}^3 \\ 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}} \\ &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\ &= 0,06 \text{ m}^3 \\ 3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}} \\ &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\ &= 0,05 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:

- bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
- bak penampung harus dibuat kedap air;
- saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;

- Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka ;
- tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
- lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :



- i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari .
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium
- b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;



- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi - sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.



- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”.
- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan			
2.	Jenis Limbah yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. dll (sebutkan)			



		Fase Padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. dll (sebutkan)		
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding : <input type="text"/> Tinggi dinding : <input type="text"/> m		
		c. Lantai	Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan : <input type="text"/> % Arah kemiringan : <input type="text"/>		



		<p>d. Bak penampung ceceran LB3 cair</p>	<p>Bak penampung <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tertutup</p> <p>Letak bak penampung : <input type="text"/></p> <p>Kapasitas : <input type="text"/></p> <p>Saluran ceceran LB3 Cair : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tertutup</p>
		<p>e. Sistem penerangan</p>	<p><input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Keterangan :.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak :.....</p>
		<p>f. Ventilasi udara</p>	<p><input type="checkbox"/> Cukup</p> <p>Keterangan :.....</p> <p>.....</p>
		<p>g. Simbol L-B3 di luar bangunan</p>	<p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada</p> <p>Keterangan :.....</p> <p>.....</p>



		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll.	<input type="text"/> m. Keterangan
		i. Titik Koordinat letak bangunanLS ;BT
5.	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan



		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan :.....
		f. Pemisahan / partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan:
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan :.....
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan :..... <input type="checkbox"/> Tidak Ada
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada		Keterangan :.....

CATATAN OBSERVASI / SARAN TINDAK :

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

ACUAN KERJA

LAPORAN VERIFIKASI

PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLH/PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)



VIII. Kesimpulan

- A. Verifikasi Administrasi
- B. Verifikasi Teknis
- C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
- D. Lampiran
 - 1. Photo-photo
 - 2. Posisi Koordinat
 - 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 - 4. Rekomendasi
 - 5. Draft SK Perizinan



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

I.	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1..... ..				
			2..... .. dst				
	2. DIMANFAAT		1..... ..				
			2..... .. dst				
	3. DIOLAH		1..... ..				
			2..... .. dst				
	4. DITIMBUN		1.....				
			2..... dst				
	5. DISERAH KE PIHAK III		1.....				
			2..... dst				



6. EKSPORT		1.....				
		2..... .. dst				
7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... ..				
		2..... .. dst				
TOTAL	B (-)					
RESIDU*	C (+)..... TON					
JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON					
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON					
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN {[A- (C + D)]/A} * 100% =.....%						
<p>KETERANGAN:</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, Bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.</p>						

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....

ttd

(Pihak Perusahaan)



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor :

Kepada Yth:

Lampiran :

Bupati Gresik

Perihal : Perpanjangan izin

di-

Penyimpanan dan/atau

Tempat

Pengumpulan Limbah B3*

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Jabatan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp / Fax :	Telp. (.....)...../..... Fax. (.....)...../.....
4.	Alamat e-mail :
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp / Fax :	Telp. (.....)...../..... Fax. (.....)...../.....
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor / Tanggal Akte Pendirian *** :
6.	NPWP :
		Jenis izin
		No. Persetujuan / izin



7.	Izin – izin yang diperoleh	:	1. AMDAL / UKL/UPL / SPPL 2. IMB 3. Izin Prinsip / Izin Lokasi 4. SIUP 5. Izin Gangguan (HO) 6.
----	----------------------------	---	---	---

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

1.	Jenis izin	:	Penyimpanan / Pengumpulan
2.	Perpanjangan	:	I / II / III / IV /
3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya	:

4.	Kelengkapan dokumen terlampir	:	1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan / dikumpulkan b. Lokasi / area tempat penyimpanan / pengumpulan c. Desain tempat penyimpanan / pengumpulan
----	-------------------------------	---	---

Catatan : (*) Coret yang tidak perlu

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL : _____

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau Surat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.



II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan

a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;

- 1). Surat penugasan;
- 2). Tanda pengenalan;
- 3). Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
- 4). Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan.

b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:

- 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
- 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
- 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
- 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
- 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
- 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;



- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

BERITA ACARA

PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal..... bulan

..... tahun..... pukul di Kabupaten provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :
 Alamat :
 Jenis industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat / Gol	Jabatan	NIP / PPLHD
1. /
2. /
3. /

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....
 .
 2.....
 .



Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cap perusahaan



Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3



Mengetahui:

Pihak Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD):



- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

BERITA ACARA

**PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan.....
tahun..... pukul, di Kabupaten.....
Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Penolakan di lakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....

Cap Perusahaan



- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
- a. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video
- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA

**PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan.....
tahun..... pukul, di Kabupaten.....
Provinsi.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Di lokasi :

1.....
2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....
2.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar- benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :.....
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :.....

Cap perusahaan

JDIH KAB GRESIK



b. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- i. Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- ii. Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/ sumber informasi diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

c. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

BERITA ACARA		
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3		
Pada hari ini,, tanggalbulan.....		
tahunpukul, di Kabupaten		
Provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Instansi	:	
NIP. /No.	:	
Pangkat/Gol.	:	
Jabatan	:	
Beserta anggota	:	
Nama	NIP / PPLHD	Jabatan
1..... /
2..... /
3..... /
secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:		
Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:
Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-		



temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

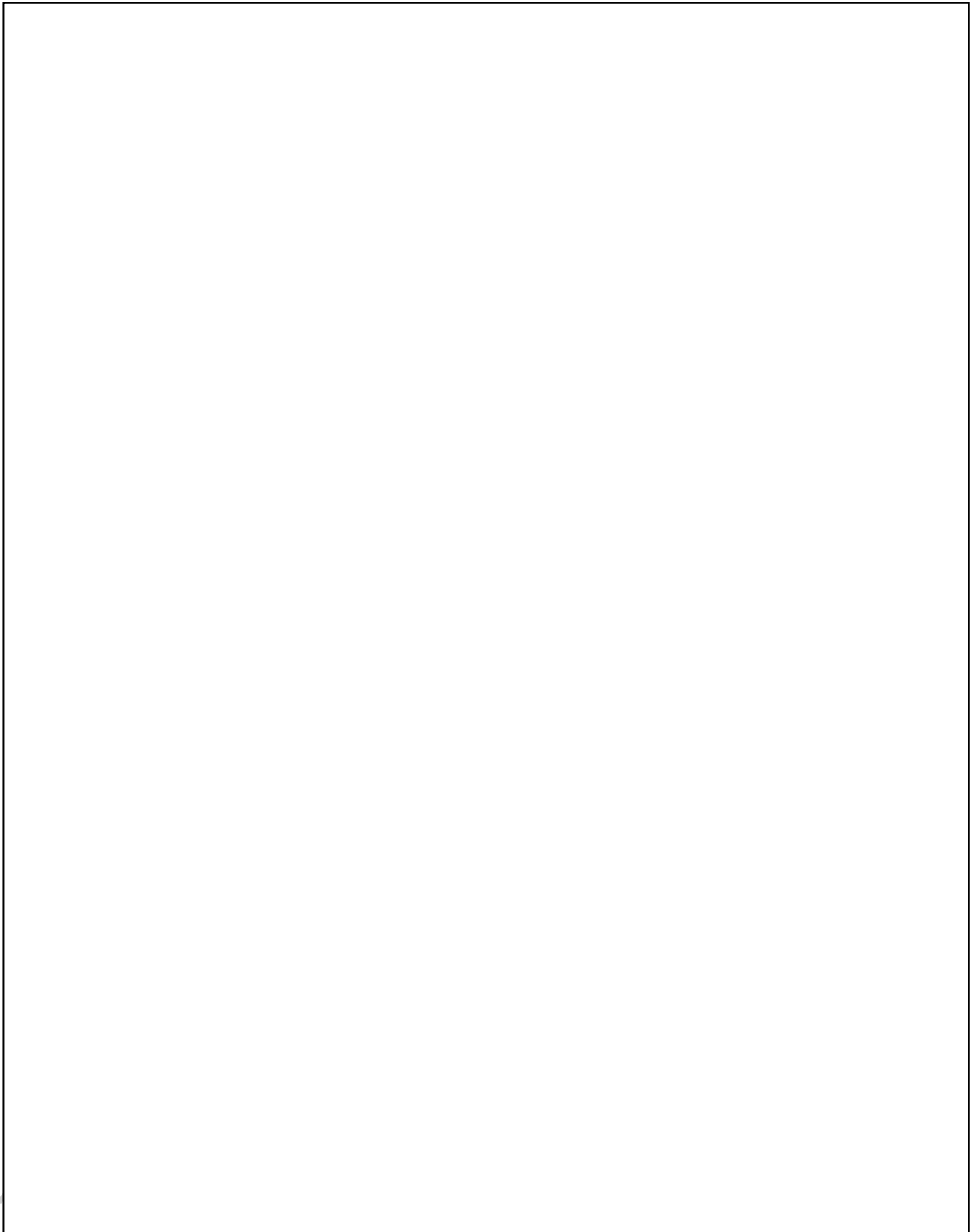
Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....
Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Instansi :..... Ttd :.....	Nama :..... Ttd :.....

Cap Perusahaan



Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3



Mengetahui:

Pihak Perusahaan :
(PPLHD):

Petugas pengawas



B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;
Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan.
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

4. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
6. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
7. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan limbah B3.
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penataan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.



IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) Contact Person perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) kondisi housekeeping;

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

- 1) sumber limbah B3;
- 2) jenis-jenis limbah B3;
- 3) karakteristik limbah B3;
- 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.



Tabel
Status Pengelolaan Limbah B3 Selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah yang dihasilkan	Jumlah yang dikelola sendiri	Jumlah yang dikelola pihak ketiga	Jumlah yang disimpan di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

1. rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
2. laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut:

No.	PELAKSANA PENGAWASAN	TEMBUSAN LAPORAN	KETERANGAN
1.	KAB / KOTA	1. KLH 2. PROVINSI	Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut pada kolom 3
2.	PROVINSI	1. KLH 2. KAB / KOTA	
3.	KLH	1. PROVINSI 2. KAB / KOTA	

BUPATI GRESIK,

ttd



TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan;



- b. pembersihan;
- c. pengumpulan;
- d. penyimpanan;
- e. pengangkutan;
- f. pengolahan dan;
- g. pemanfaatan;

III. PERSIAPAN

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenal;
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

IV. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pertemuan Pendahuluan Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

- 1) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh

- Penanggungjawab usaha/kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

- 2) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi:



- a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
 - b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi 3
- (2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi:
- a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
 - b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, Risk Base Screening Level (RBSL))
 - c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH
- (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
- a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 - b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3
- (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara:
- a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
- (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:
- a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - c) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- (6) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:



BERITA ACARA
PENGAMBILAN SAMPEL PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,....., tanggal..... bulan..... tahun.....
 diKabupaten/Kota Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1...../.....
2...../.....

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi
Alamat
Koordinat

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :
 Nama Instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode	Sampel	Parameter	Analisa Lapangan	Jenis sampel	Waktu Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:

Cap Perusahaan



Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3

- (7) Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

BERITA ACARA

PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA

PENGAWASANPELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahun
pukul, di Kabupaten.....Provinsi..... kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :



Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan di lakukan dengan alasan:

- a)
- b)
- c)

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Ttd:

Cap Perusahaan



(8) Pengambilan Gambar/Foto/Video

- a) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- b) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA

**PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan.....
tahun.....pukul.....,di Kabupaten.....Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3. Di lokasi :

1.....

2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....

2.....

Demikian Pernyataan Penolakan pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:	Nama: Instansi: Ttd:

Cap Perusahaan

JDIH KAB GRESIK



- (9) Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

BERITA ACARA

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun.....
 pukul....., di Kabupaten..... Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Instansi :
 NIP. /No. PPLHD :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1 /
2 /
3 /

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pihak Pemerintah Kab. Gresik	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Ttd:
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Ttd:
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Ttd:

Cap Perusahaan



Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

3) Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

4) Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.



Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan
- 4) Pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 5) Saran dan Tindak Lanjut

Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Tanggal :

Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			



	a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			

	c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			



	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			
--	---	--	--	--

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.	DATA PERUSAHAAN			
	1. Nama Perusahaan:			
	2. Alamat Perusahaan:			
	3. Jenis Industri :			
II.	TIM PENGAWAS	1. / NIP/No.PPLHD 2. / NIP/No.PPLHD 3. / NIP/No.PPLHD		
III.	PENETAPAN MEDIA TERCEMAR	Ada	Tidak	Ket.
IV.	RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN			
		Ya	Tidak	Ket.
	A. TINDAKAN PENANGGULANGAN			
1	Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?			
2	Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?			

3	Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan oil boom?			
4	Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak			



		dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?			
	5	Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?			
			Ya	Tidak	Ket.
B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN					
	1	Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan?			
	2	Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan wakil komandan satgas?			
	3	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			
			Ya	Tidak	Ket.
C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3					
1. Perairan Terbuka					
a. Lepas Pantai dan Pesisir					
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
	iv.	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
	vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			



	b. Perairan Tertutup					
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?					
ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?					
iii.	Apakah dilakukan penyemprotan dispersant (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan) ?					
iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?					
v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?					

vi.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?					
2. Ekosistem Terumbu Karang						
a. Terumbu Karang Laguna						
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom) ?					
ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?					
iii.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?					
iv.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?					
v.	Apakah menggunakan dispersant ?					
vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?					
vii.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?					
b. Fore Reefs, Rataan Terumbu (Reef flats) dan Terumbu Patahan (Reef Crests)						
i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah ?					
ii.	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?					
iii.	Apakah menggunakan pompa bebas					



		udara (vacum pump)?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	v.	Apakah menggunakan dispersant ?			
	vi.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	vii.	Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?			
	3. Ekosistem Mangrove				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iv.	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
	v.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	vi.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	vii.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	viii.	Apakah menggunakan dispersant ?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	x.	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
	xi.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
	xii.	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?			
	4. Padang Lamun				
	i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (boom)?			
	ii.	Apakah menggunakan mesin penyedot (skimmer)?			
	iii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami			



		(setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vii.	Apakah menggunakan dispersant ?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
	x.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk bawah permukaan ?			
	xi.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen?			
	xii.	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
	5. Pantai Berpasir				
	i.	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	ii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	vii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	6. Pantai Berlumpur				
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			



	iv.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	v.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
	vi.	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
	vii.	Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?			
	viii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	ix.	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	x.	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
7. Pantai Berbatu					
	i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan rendah?			
	ii.	Apakah menggunakan dispersant ?			
	iii.	Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?			
	iv.	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
	v.	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
	vi.	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump) untuk permukaan?			
	vii.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (flushing) tekanan tinggi?			
	viii.	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
	ix.	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
V. PELAKSANAAN PEMULIHAN					
	A.	Tatacara Pengumpulan Limbah B3 padaMedia Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
	iii.	Apakah sarana pengumpulan sementara			



		dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
	iv.	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?			
	v.	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
	vi.	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan ?			
	vii.	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?			
	viii.	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara ?			
	ix.	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
	B.	Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar			
	i.	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
	ii.	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3?			
	iii.	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani ?			
	iv.	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas			



		manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
--	--	--	--	--	--

	v.	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.			
	vi.	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	vii.	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain ?			
	viii.	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?			
	ix.	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
	x.	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% ?			
	xi.	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan ?			
	xii..	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
	xiii.	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding			



		dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
	xiv.	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
	xv.	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			
VI.	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN				
	A.	Perairan Terbuka			
	1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3) ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota Perairan, (b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan ?			
	B.	Ekosistem Terumbu Karang			

	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter persentase tutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang) ?			
	2.	Apakah hasil penghitungan persentase tutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?			
	C.	Ekosistem Mangrove			



	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembanding?			
	D.	Ekosistem Padang Lamun			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembanding)?			
	2.	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembanding ?			
	E.	Pantai Berpasir			
	1.	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter			



		kandungan limbah B3 pada pasir ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
	F.	Pantai Berlumpur			

		Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
		Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
	G.	Pantai Berbatu			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
VII.	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)				
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII.	LAMPIRAN				
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	dll. yang diperlukan			

.....,

Petugas,

1.....ttd.....

2.....ttd

